

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Efektivitas

Makna kata “efektivitas” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keefektivan, yakni diartikan sebagai keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Efektivitas sendiri berasal dari kata efektif yang mempunyai makna tepat, manjur dan mujarab. Kamus Ilmiah Populer mengartikan kata efektivitas sebagai ketepatangunaan /ketepatan penggunaan, sebuah hasil guna, atau sebagai penunjang tujuan.

Para Ahli juga mempunyai pendapatnya masing-masing dalam mendefinisikan kata efektivitas:

1. Steers

Efektivitas merupakan suatu jangkauan usaha dari sebuah program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu.¹

2. Gibson Et. Al

Efektivitas adalah sebuah penilaian yang dibuat berbhungan dengan prestasi suatu individu, kelompok maupun organisasi. Semakin besar prastasi yang diraih dari standar, maka prestasi tersebut dapat dinilai efektif.²

¹Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*(Alih Bahasa M.Yamin), Jakarta, Erlangga, 1985, hal.87.

²Dosen Pendidikan 2,*Efektivitas Adalah*, www.dosenpendidikan.co.id, diakses pada 16 Februari 2020.

3. Wiyono

Efektivitas diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan.³

4. Ravianto

Efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana orang menghasilkan pengeluaran yang sesuai dengan diharapkan.⁴

5. Soerjono Soekanto

Mengatakan bahwa efektif merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai suatu tujuan. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, dan mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.⁵ Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 unsur yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukumnya
- c. Faktor sarana dan prasaran
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan⁶

³Ibid.

⁴Ibid.

⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988, hal. 80.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 8.

Efektivitas pada dasarnya adalah sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan, salah satu bentuk produktifitas yang mengarah kepada pencapaian untuk dikerjakan secara maksimal untuk mencapai target yang memenuhi standar dan kualitas. Semakin besar atau banyaknya persentase keberhasilan yang dicapai maka dapat dikatakan produktifitas program tersebut semakin efektif.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan keterkaitannya anatara *Law in the book theory* dan *Law in action*.⁷

Raida L.Tobing mengutip dari Bustanul Arifin mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektivnya hukum apabila didukung oleh tiga pilar penting, yakni:⁸

- a. Lembaga atau penegak hukum yang beribawa dan yang dapat dihandalkan;
- b. Peraturan hukum yang sistematis dan bermanfaat;
- c. Kesadaran masyarakat yang tinggi tentang hukum

⁷Soleman B.Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press, 1993, hal.47-48.

⁸Raida L.Tobing (hasil penelitian), *Efektivitas Undang-undang Money Loundring*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasioanal, 2011, hal.11.

Efektivitas hukum adalah suatu proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Selain melihat dari kelima unsur yang disebutkan diatas tersebut, jika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.⁹

Lawrence M. Friedman telah mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya dalam penegakan hukum ada 3 unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur/budaya hukum.¹⁰

- a. Substansi Hukum yaitu hakikat dari isi yang dikandung didalam peraturan perundang-undangan. Substansinya mencakup semua dari aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Struktur Hukum yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga yang berwenang dan pembuat hukum.
- c. Kultur Hukum yaitu merupakan bagian dari kultur-kultur pada umumnya atau kebiasaan-kebiasaan, opini masyarakat dan pelaksanaan hukum, cara-cara bertindak dan berfikir atau bersikap, baik untuk membelokkan kekuatan sosial menuju hukum maupun menjauhi hukum.¹¹

⁹Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Jurisprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legisprudence)*, Volume 1, Jakarta, Jurnal Kencana, 2009, hal.375.

¹⁰ Jaka Raya Andika Putra, *Skripsi: "Tanggung Jawab Hukum Kepolisian Terhadap Barang Sitaan Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berupa Kendaraan Bermotor (Studi di Satlantas Polres Kota Batu)"*, (Malang: UMM 2017).

¹¹ H. Zaeni Asyhadiedan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, hal.156.

B. Tinjauan Tentang Kejahatan

Dari perspektif ilmu hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah suatu perbuatan manusia yang dinilai melanggar dan bertentangan dengan apa yang telah ada dan telah tercantum dalam kaidah hukum. Perbuatan jahat tersebut dinilai melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah kaidah hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Lebih jelasnya kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dan dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan untuk orang lain.

Definisi tentang kejahatan juga diartikan sangat beragam oleh para ahli:

- a. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹²
- b. W.A Bonger, Kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan

¹² Anandito Utomo, *Definisi Kejahatan dan Jenis-Jenis Kejahatan Internet*, www.hukumonline.com, di akses pada 16 Februari 2020.

kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.¹³

- c. Van Bemmelen merumuskan bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak asusila dan merugikan serta menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.¹⁴
- d. B. Simandjutak, kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.¹⁵

C. Tinjauan Upaya Penanggulangan Kejahatan

Fungsi hukum tidak hanya sekedar menciptakan kemandirian dan ketertiban didalam masyarakat, fungsi hukum telah meluas yakni untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Roscou Pound seorang filsafat hukum Amerika yang menyatakan "*Law as a tool of social engineering*", yakni menggunakan hukum sebagai alat, maka perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁶

¹³W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 1982, hal.25.

¹⁴M. Abdurrahman, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual*, Bandung, Nuansa Aulia, 2016, hal.5.

¹⁵Ibid.

¹⁶Roscou Pond, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta, Brhatara, 1989, hal. 51.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa peranan hukum nampak dalam fungsinya sebagai *social control* dan *social engineering* yakni :

a. *Social Control*

Social Control (kontrol sosial) adalah fungsi hukum untuk mempengaruhi warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Termasuk dalam kontrol sosial ini ialah :

1. Pembuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang;
2. Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.¹⁷

b. *Social Engineering*

1. *Social Engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan sosial sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat hukum.
2. Berbeda dengan fungsi kontrol sosial yang lebih bersifat praktis yaitu untuk kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum lebih mengarah pada pembahasan sikap dan

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hal.38.

perilaku masyarakat dimasa yang akan datang sesuai dengan keinginan pembuat peraturan.¹⁸

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan, fungsi hukum ditempatkan sebagai suatu acuan atau pedoman yang dapat berinteraksi dengan acuan atau pedoman yang lain. Hal ini dikarenakan penanggulangan kejahatan tidak cukup melalui sarana hukum saja, tetapi juga dengan usaha-usaha yang bersifat kebijakan sosial seperti membuka lapangan kerja, perbaikan moral, perbaikan pendidikan masyarakat serta perbaikan lingkungan. Karena pada dasarnya, tujuan penghukuman pidana atas kejahatan tidak hanya untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan dan siksaan sebagai pembalasan. Sutherland mengemukakan manfaat praktis dari kriminologi untuk menekan dan mengurangi jumlah kejahatan. Itulah sebabnya politik kriminal (cara-cara menanggulangi kejahatan) condong kearah rehabilitasi narapidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan dan pergaulan (kekeluargaan) yang bernilai.¹⁹

Pernyataan Sutherland tentang penanggulangan kejahatan tersebut pada intinya menunjukkan usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan sebagai perbaikan untuk penjahat (narapidana) dan pencegahan agar tidak muncul penjahat baru. Kedua metode tersebut memang sangat penting, mengingat kejahatan tidak dapat sepenuhnya dilenyapkan total,

¹⁸Ibid.

¹⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni Bandung, 1983, hal. 39.

namun bisa dikurangi. Sebagaimana ada pedoman yang sering kita dengar bahwa “mencegah adalah lebih baik daripada mengobati”.

Metode penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Sutherland tersebut, ternyata digunakan pula oleh Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan terbagi dalam 2 (dua) konsep, yakni :²⁰

1. Upaya penanggulangan yang bersifat penal (represif)

Suatu upaya penanggulangan yang bersifat menekan, mengekang, menahan atau menindas yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok organisasi, maupun instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang ada secara tegas dan tuntas terhadap suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya gejala-gejala alam maupun gejala-gejala sosial yang cenderung merugikan masyarakat.

2. Upaya penanggulangan yang bersifat non-penal (preventif)

Suatu proses, perbuatan atau cara menanggulangi dengan mencegah supaya tidak terjadi suatu permasalahan kejadian yang ditimbulkan oleh adanya gejala-gejala alam maupun gejala-gejala sosial yang merugikan masyarakat yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, organisasi maupun instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang ada sebelum pada saat permasalahan atau kejadian itu sedang berlangsung.

²⁰Ibid, hal. 27.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan

Ketika membicarakan upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum tetap harus juga membicarakan tentang penegak hukum yang memikul tugas tersebut yakni Kepolisian Republik Indonesia. Hampir diseluruh negara di dunia ini, polisi bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, memerangi kejahatan dan penyakit masyarakat.²¹

Menurut Satjipto Rahardjo, sekalipun bersama-sama berada dalam jajaran penegak hukum, tetapi polisi memiliki tempatnya tersendiri. Keadaan demikian tersebut karena pertama-pertama disebabkan oleh polisi bisa disebut sebagai suatu badan kerakyatan. Hal yang demikian itu berhubungan dengan pekerjaannya yang selalu harus berada ditengah-tengah rakyat. Berbeda dengan jaksa atau hakim yang tempatnya seakan jauh dari rakyat dan kontak-kontak intensif. Satjipto Rahardjo juga menyebut polisi sebagai penegak “hukum jalanan”.²²

Peranan polisi dalam penanggulangan kejahatan merupakan rangkaian dari proses peradilan pidana yang menggambarkan peristiwa-peristiwa secara teratur mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemahaman, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, pemidanaan, hingga ke lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat. Sebelum berlangsungnya proses tersebut tidak boleh di

²¹Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2009, hal. 37-38.

²²Ibid, hal. 39

lupakan proses pembuatan Undang-Undang yang mengatur pranata-pranata hukum serta memberi wewenang dan aturan main dalam pelaksanaannya.²³

Peran kepolisian dalam memberikan ketertiban keamanan dan kesejahteraan pada masyarakat telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa, *Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*²⁴

Dalam melaksanakan tujuan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas pokok pada pasal 13 yang berbunyi “*Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:*”²⁵

- a. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat*
- b. *Menegakkan hukum, dan*
- c. *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”*

²³Ibid, hal. 40

²⁴Lihat Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁵Lihat Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok yang ada pada pasal 13 diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas yang di atur dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “(1) Dalam melaksanakan tugas pokok yang sebagaimana dimaksud Pasal 13, *Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas* :²⁶

- a. *Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;*
- b. *Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;*
- c. *Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;*
- d. *Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;*
- e. *Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;*
- f. *Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;*
- g. *Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;*

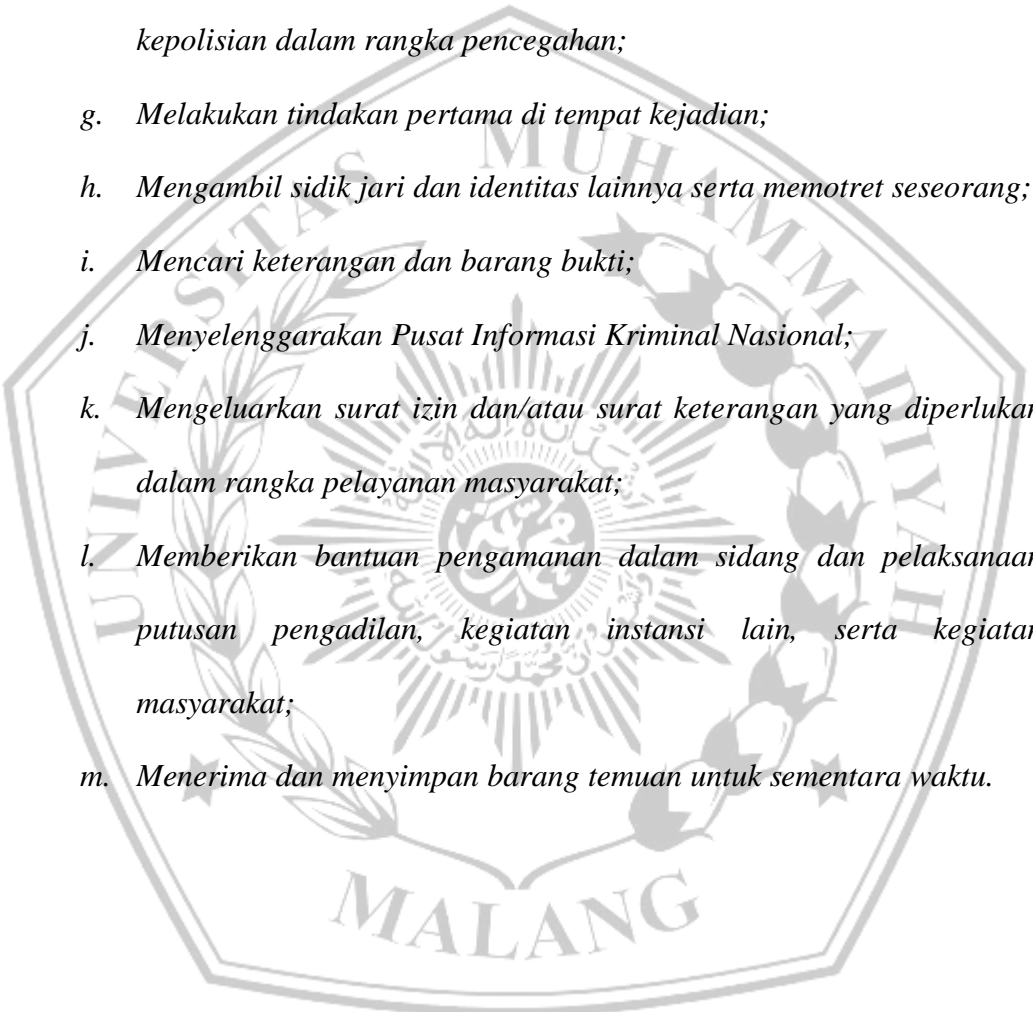
²⁶Lihat Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;*
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;*
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;*
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta;*
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Selain tugas-tugas yang telah disebutkan di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 15 ayat (1):²⁷

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;*
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;*
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;*

²⁷Lihat Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 
- d. *Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;*
 - e. *Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;*
 - f. *Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;*
 - g. *Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;*
 - h. *Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;*
 - i. *Mencari keterangan dan barang bukti;*
 - j. *Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;*
 - k. *Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;*
 - l. *Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;*
 - m. *Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.*